



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



DINAS SOSIAL KOTA JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dijelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun oleh masing-masing Instansi. Walaupun Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan sistem akuntabilitas, namun LKIP ini juga merupakan kebutuhan Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 ini menyajikan berbagai data sebagai tolak ukur keberhasilan atas kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial.

Keberhasilan di bidang sosial yang dicapai, tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Sosial semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum, dalam rangka mewujudkan rencana strategis yang konsisten dan realistis yang merupakan tujuan utama Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 ini dibuat dan kami sangat menyadari bahwa dalam Penyusunan LKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan, guna perbaikan dan kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepan. Semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan LKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, terutama bagi Dinas Sosial Kota Jambi pada khususnya dan Pemerintah Kota Jambi pada umumnya.

Jambi, 14 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Struktur Organisasi 2

1.2 Tugas dan Fungsi..... 3

1.3 Isu-Isu Strategis 4

1.4 Kepegawaian 4

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 5

1.6 Keuangan..... 8

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 10

2.1 Perencanaan Stategis 10

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah..... 10

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial Kota Jambi 11

2.1.2.1 Tujuan Dinas Sosial Kota Jambi 11

2.1.2.2 Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi..... 11

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 12

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025..... 15

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 18

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi 18

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 19

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu..... 20

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah 21

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi.... 22

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 23

3.1.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya 24

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja..... 25

3.2 Realisasi Anggaran 2025 29

BAB IV PENUTUP 33

4.1 Kesimpulan 33

4.2 Rencana Tindak Lanjut..... 33

LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

1.1 Komposisi Pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.....5

1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 desember 2025.....6

2.1 Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-202912

2.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan12

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 202514

2.4 Target Belanja Dinas Sosial Kota Jambi APBD Perubahan tahun 2025.....15

2.5 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis15

2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja16

3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja18

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....19

3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025.....20

3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025.....21

3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
2025 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2025-202921

3.6 Analisis Efisiensi24

3.7 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Jambi.....29

3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 202532

4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 202534

4.2 Inovasi35

4.3 Prestasi dan Penghargaan36

BAB I

PENDAHULUAN

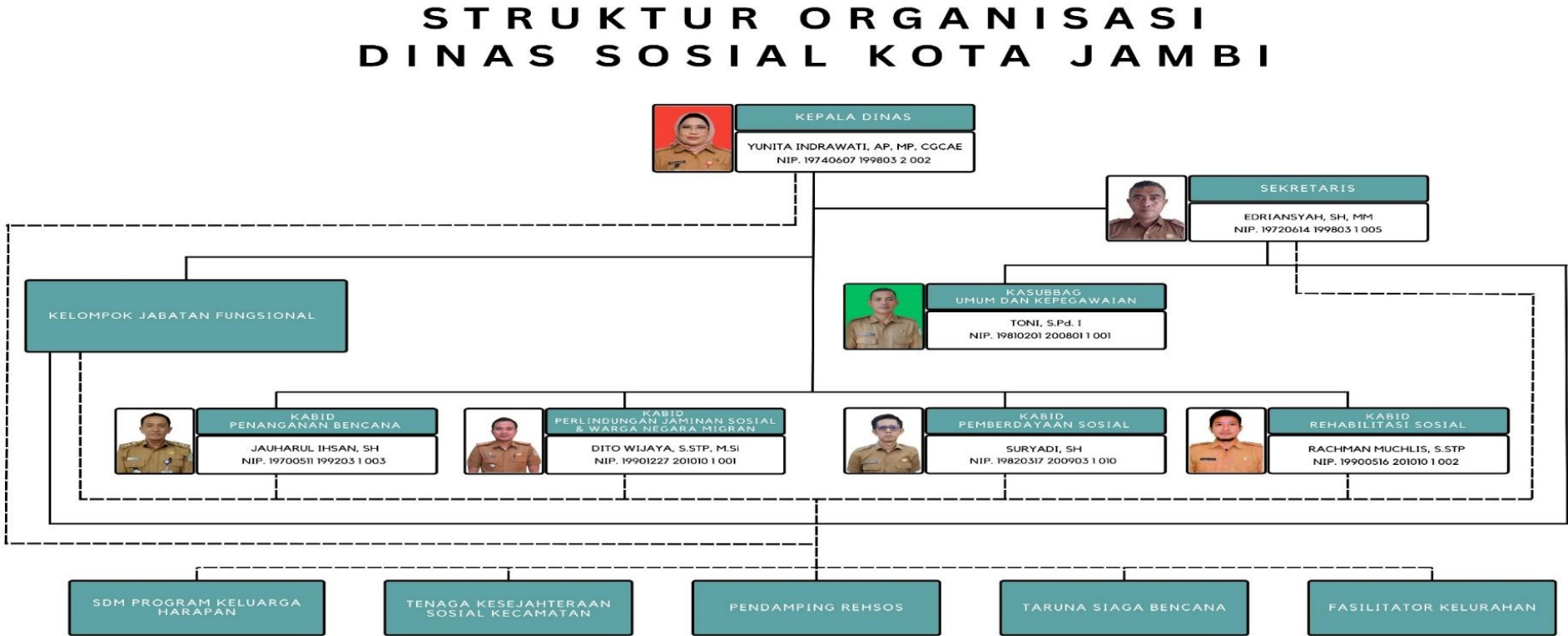
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan RPJMD 2025-2029 dan rencana kerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Sosial Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Jambi untuk meningkatnya kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kota Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan tugas pokok yaitu: Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan tugas pembantuan yang meliputi tugas perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang penanganan bencana, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan bencana;
- b. penetapan kriteria data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Sosial Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah PAS seiring dengan penambahan penduduk;
2. Tidak Sinkronnya Data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
3. Rendahnya keterampilan Penduduk Miskin;
4. Belum terpenuhinya fasilitas pelayanan dan rehabilitasi bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban NAPZA, orang dengan HIV/AIDS dan lain-lain;
5. Masih ditemuinya pengemis di jalan-jalan protokol yang berasal dari luar daerah.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota Jambi memiliki sumber daya manusia pada tahun 2025 terdapat 84 Pegawai yang terdiri dari 25 orang PNS, 59 orang PPPK dan 85 orang PPPK Kementerian Sosial. Berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai Dinas Sosial Kota Jambi laki-laki sebanyak 52,38% (44 orang) dan sisanya sebanyak 47,62% merupakan pegawai perempuan (40 Orang). Sedangkan pegawai Kementerian Sosial didominasi perempuan sebanyak 60% (51 orang) dan sisanya sebanyak 40% (34 orang).

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial Kota Jambi

No	Nama Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1	S2
2	Sekretaris	1	S2
3	Kepala Bidang Penanganan Bencana, Pemberdayaan Sosial, Linjamsos dan WN Migran, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	4	S1 3 S2 1
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1
5	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	8	S1
6	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Pertama	3	S1
7	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	1	S1
8	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	S1
9	Fungsional Perencana Ahli Pertama	2	S1
10	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	D3
11	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	1	S1
12	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	3	S1
13	Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama	2	S1
14	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	2	S1
15	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	S1
16	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	S1
17	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	S1
18	Penelaah Teknis Kebijakan	2	S1
19	Pengadministrasi Perkantoran	12	SMA
20	Penata Layanan Operasional	18	S1
21	Operator Layanan Operasional	14	SMA
22	Pengelola Umum Operasional	3	SD
Kementerian Sosial			
23	Penata Layanan Operasional	7	S2
24	Penata Layanan Operasional	75	S1
25	Pengelola Layanan Operasional	3	D3
26	Operator Layanan Operasional	0	SMA
Jumlah		169	

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan roda empat	10
2	Kendaraan roda empat	1
3	Kendaraan roda empat	1
4	Kendaraan roda dua	21
5	Kendaraan roda dua	3
6	Kendaraan roda dua	1
7	AC 1 PK	25
8	AC 1 PK	1
9	AC 1 PK	3
10	AC 2 PK	5
11	AC Split	2
12	AC Stand 2 PK	3
13	AC Stand 3 PK	1
14	AC 1 1/2 PK	3
15	Alat pemadam api ringan	20
16	Lemari arsip	27
17	Lemari rak buku	5
18	Lemari piring	2
19	Rak Lemari Gudang Bantuan Sosial	3
20	Rak biasa	1
21	Rak TV	1
22	Rak sound system	1
23	Lemari pakaian	7
24	Lemari es 2 pintu	1
25	Lemari es 1 pintu	1
26	Amplifier (TOA)	1
27	Kursi stenlis ruang tunggu	6
28	Kursi stenlis ruang tunggu	2
29	Bed susun + kasur	7
30	Tempat tidur tingkat	1
31	Bendera Hias/Umbul-umbul	1
32	Camera digital	3
33	Camera digital (DSLR)	2
34	CCTV merk TANAKA	5
35	CCTV	2 Paket
36	Komputer PC	3
37	Komputer PC	28
38	Dispenser	13
39	Filling Cabinet (besi)	20
40	Genset	1
41	Hordeng	16
42	Handy Talkie	3
43	Harddisk eksternal	2
44	Harddisk eksternal	6

No	Jenis Barang	Jumlah
45	Infocus	1
46	Infocus	7
47	Karpet/ambal sholat	2
48	Karpet	9
49	Kipas angin	6
50	Kitchen set	1
51	Komputer jaringan	1
52	Kursi Putar Sandaran Tinggi	3
53	Kursi Putar Sandaran Tinggi	10
54	Kursi sandaran putar sedang	14
55	Kursi Kerja Phoenix	3
56	Kursi Kerja	3
57	Kursi kerja pejabat eselon III	4
58	Kursi tamu	4
59	Kursi tamu	2
60	Kursi roda	5
61	Lambang burung garuda	1
62	Layar projector	1
63	Laptop	21
64	Laptop	2
65	Notebook	2
66	Notebook	7
67	Notebook	1
68	Meja kerja	38
70	Meja rapat	6
71	Meja pingpong	3
72	Meja Receptionist Kantor	1
73	Meja Kerja Front Office	1
74	Mesin Potocopy	1
75	Mesin Penghancur Kertas	1
76	Mesin Penyemprot Air	1
77	Mesin Absensi	2
78	Mesin Absensi	1
79	Mesin pompa air	2
80	Mesin cuci	1
81	Mic	2
82	Speaker	3
83	Sound system	5
84	Speaker wireless portable	3
85	Mixer	1
86	Papan Merek kantor ruang kessos	1
87	Papan Informasi papan daftar urut kepangkatan (DUK)	1
88	Papan struktur organisasi	1
89	Papan visi misi	1
90	Papan data kegiatan bidang	1
91	papan merk ruangan	1
92	Papan data bergambar disostek	1

No	Jenis Barang	Jumlah
93	papan data rawan resiko bencana	1
94	Papan data ketenagakerjaan	1
95	Papan informasi data PMKS	1
96	Papan informasi running text	1
97	Papan data Informasi PKH	1
98	Papan Pengumuman Pakai Roda	1
99	Papan Merk Rumah Pintar	1
100	Podium	1
101	Pemasangan Teralis	1
102	Peralatan kesehatan mobil ambulance	1
103	Printer	24
104	Printer	13
105	Printer ink jet	6
106	Printer laser	1
107	Printer besar	1
108	Televisi (tabung)	6
109	Televisi (LED)	3
110	Toa jinjing	1
111	Tikar Plastik	1
112	Tangga alumunium 4 tingkat	1
113	Tiang bendera	1
114	Tiang bendera	1
115	Tape DVD	1
116	Sofa	1
117	Tandu lipat	2
118	Sirine	1
119	Tedmon	2
120	Scanner	1
121	Timbangan tinggi badan dan berat	1
122	TV LED utk CCTV Aqua 32 inch	1
123	TV Led Samsung (BTT 2020)	9
124	Tablet android	23
125	Vakum cleaner	1
126	Wireless	1
127	Standing TV	2
128	Mesin antrian	1

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Sosial Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 13.798.960.500,- Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Sosial Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024-2026. Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Sosial Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmoni dan berkesinambungan. Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan

5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial, Dinas Sosial Kota Jambi mendukung misi:

“Penguatan Kualitas Sumber daya Manusia, Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Sosial Kota Jambi

2.1.2.1 Tujuan Dinas Sosial Kota Jambi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adapun Tujuan Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Sosial Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Dinas Sosial.

2.1.2.2 Sasaran Dinas Sosial Kota Jambi

Sasaran Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Cara Pengukuran Indikator	Target Sasaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani dibagi dengan Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial dikali dengan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang menerima bantuan dibagi dengan Jumlah Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi dikali dengan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang Tertangani dibagi dengan Jumlah PPKS Terlantar di Luar Panti yang Dijangkau dikali dengan 100%.	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategis Dinas Sosial Kota Jambi pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Program Penanganan Bencana	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi
		1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Sandang
		3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		4. Pelayanan Dukungan Psikososial
		b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi
		1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Program Pemberdayaan Sosial	a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
		1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin
		1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	Program Rehabilitasi Sosial	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Sandang
		3. Penyediaan Alat Bantu
		4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
		1. Pemberian Layanan Kedaruratan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta taget kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	%	100
Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	%	100
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	%	100

PENJELASAN KONSEPTUAL HUBUNGAN ANTARA SASARAN DAN PROGRAM DINAS SOSIAL

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS	%	100
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar	%	100
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial	%	100
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	%	100
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	100

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp.14.668.912.000,- dengan rincian belanja operasional sebesar Rp.14.666.912.000,- dan belanja modal sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp.13.798.960.500,- dengan rincian belanja operasional sebesar Rp.13.798.960.500,- dan belanja modal sebesar Rp.0,-.

Tabel 2.4
Target Belanja Dinas Sosial Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	13.798.960.500	100 %
Jumlah	13.798.960.500	100 %

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Program Penanganan Bencana	Rp 491,616,213	3.56%
2	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1,516,661,850	10.99%
3		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2,933,994,235	21.26%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 39,750,000	0.29%
5		Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1,156,249,151	8.38%
6		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,660,689,051	55.52%
		JUMLAH	Rp13,798,960,500	100.00%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 14 kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Jambi.

Tabel 2.6
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN(RP.)	Realisasi Kinerja				Realisasi				REALISASI (RP.)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3	4	5	6	9	10	11	12	13
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	25%	25%	25%	25%	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	25%	25%	25%	25%	491,616,213	20.00%	15.00%	20.00%	45.00%	9.73%	12.96%	17.59%	53.79%	462,504,360
						Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang di tangani					245,874,400									218,781,860
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana					245,741,813									243,722,500
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	25%	25%	25%	25%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di Layani	25%	25%	25%	25%	1,156,249,151	15.70%	23.47%	25.67%	35.16%	12.02%	13.39%	18.55%	46.22%	1,042,733,679
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di Layani					686,749,951									631,787,044
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di Layani					469,499,200									410,946,635
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					39,750,000					0.00%	33.55%	14.78%	25.31%	29,270,211
						Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					39,750,000									29,270,211

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN(RP.)	Realisasi Kinerja				Realisasi				REALISASI (RP.)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		3	4	5	6			9	10	11	12		3	4	5	6	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3	4	5	6	9	10	11	12	13
Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	25%	25%	25%	25%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS	25%	25%	25%	25%	1,516,661,850	15.00%	24.55%	41.65%	18.80%	10.10%	20.85%	18.64%	36.33%	1,303,284,070
						Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan					1,516,661,850									1,303,284,070
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani dan persentase fakir miskin yang didata					2,933,994,235					1.88%	1.60%	64.67%	26.64%	2,781,117,898
						Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin					2,933,994,235									2,781,117,898
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	7,660,689,051	20.00%	25.00%	25.00%	30.00%	17.73%	22.24%	20.92%	23.98%	6,501,490,843
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP					17,554,800									15,151,100
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5,943,045,317									4,998,074,892
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30,550,000									23,976,650
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					121,220,000									85,312,646
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah					471,596,334									427,757,422
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah					470,282,400									402,342,283
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah					606,440,000									548,875,850

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Jambi kedepa.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Jambi dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai perangkat peringkat kinerja yang termuat dalaam permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori	Rata-rata % capaian
1	Sangat Baik	≥90
2	Baik	75,00-89,9
3	Cukup	65,00-74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$Persentase\ Pencapaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$Persentase\ Pencapaian\ Kinerja = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	4,718	4,718	100%	2,242	1,300	172.46%	100%
Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	8,433	10,000	84.33%	75,718	72,000	105.16%	100%
Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	729	729	100%	1,319	1,250	105.52%	100%

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025, indikator Persentase Pelayanananan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki realisasi sebesar 2.242 KK dengan capaian 172.46% dari target sebesar 1.300 KK.

Indikator Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan realisasi sebesar 75.718 jiwa dengan capaian 105.16% dari target sebesar 72.000 jiwa dengan PSKS yang terlibat aktif dalam pelayanan PPKS sebanyak 187 orang.

Indikator Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani memiliki realisasi sebesar 1.319 jiwa dengan capaian 105.52% dari target sebesar 1.250 jiwa. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori (Sangat Baik).

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS	Jumlah PSKS yang aktif menangani PPKS dibagi dengan Jumlah PSKS seluruhnya dikali 100%	187	187	100.00%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar	Jumlah Orang terlantar yang dilayani dibagi dengan Jumlah Orang terlantar yang terjangkau dikali 100 %	225	225	100.00%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Jumlah PPKS yang dilayani dibagi dengan Jumlah PPKS seluruhnya dikali 100 %	1,250	1,319	105.52%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Jumlah Masyarakat yang terlayani dibagi jumlah masyarakat yang memerlukan layanan dikali 100 %	72,000	75,718	105.16%
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani dibagi korban bencana alam dan sosial dikali 100 %	1,300	2,242	172.46%

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKU)

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025

Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	4,718	4,718	100%	2,242	1,300	172.46%	172.46%
Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	8,433	10,000	84.33%	75,718	72,000	105.16%	124.71%
Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	729	729	100%	1,319	1,250	105.52%	105.52%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah lebih dari 100%. Capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2025-2029

Indikator Sasaran	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	172.46%	100%		100%		100%		100%	
Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan	100%	105.16%	100%		100%		100%		100%	
Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	100%	105.52%	100%		100%		100%		100%	

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun dibandingkan dengan target.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Taget

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Indikator Sasaran	Target Nasional/Provinsi	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	-	100 %	100 %
2	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan	-	100%	100%
3	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	-	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi indikator sasaran tahun 2025 Dinas Sosial Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 100%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja yaitu:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi:

1. Ketidaksesuaian data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seiring dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan sasaran layanan dan bantuan sosial tidak tepat sasaran;
2. Belum adanya regulasi kebijakan terkait anak rentan dan lansia terlantar;
3. Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat produktivitas PAS;
4. Belum optimalnya kontribusi peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial;
5. Banyaknya PAS yang berasal dari luar daerah;
6. Ketersediaan anggaran urusan sosial yang belum maksimal.

Faktor keberhasilan atas capaian kinerja yaitu:

1. Jumlah PSKS yang memadai seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 1 orang, Pendamping Rehabilitasi Sosial 3 orang, Taruna Siaga Bencana 30 orang, Fasilitator Kelurahan 68 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial 58 lembaga serta keberadaan pilar sosial dan mitra sosial yang memadai dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandang Disabilitas;

3. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Jambi;
4. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan sesuai Peraturan Wali Kota No. 29 Tahun 2016 terkait Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan;
5. Adanya regulasi dan dukungan kebijakan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu;
6. Maksimalnya kerjasama dengan stakeholder terkait.

Alternatif solusi yang dilakukan:

1. Menyusun kebijakan terkait Penyelenggaraan PAS;
2. Penerapan aplikasi Atasee dalam memverifikasi dan memvalidasi data PAS agar diperoleh data yang akurat;
3. Mengoptimalkan kemampuan dan kontribusi PSKS dalam hal penanganan PAS;
4. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung dalam pelayanan PAS;
5. Mengupayakan peningkatan kemandirian bagi PAS.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisien dari sasaran Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2025.

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisien
1	2	3	4	5	6= (5-4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	94.08%	5.92%
2	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	100%	91.77%	8.23%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	100%	89.63%	10.37%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 100%. Perhitungan ini diukur dengan formulasi Jumlah PSKS yang aktif menangani PPKS dibagi dengan Jumlah PSKS seluruhnya dikali 100%. Jumlah PSKS Dinas Sosial sebanyak 187 orang dengan rincian, Pendamping Program Keluarga Harapan (PPPK Kementerian Sosial) sebanyak 85 Orang, Fasilitator Kelurahan sebanyak 68 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 1 orang, Taruna Siaga Bencana sebanyak 30 orang dan Pendamping Rehabilitasi Sosial sebanyak 3 orang.
Pada tahun 2025 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jambi sebanyak 17.774 Keluarga. Dalam hal ini Dinas Sosial telah melaksanakan Graduasi KPM-PKH sebanyak 723 Keluarga, 35 keluarga diantaranya memperoleh bantuan sosial berupa barang usaha ekonomi produktif bersumber dari dana APBD.

Selain itu, bantuan sosial juga diberikan kepada keluarga veteran, pahlawan, warakawuri sebanyak 48 orang.

Pemberian bantuan hibah untuk mendukung kegiatan kesejahteraan sosial kepada 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Jambi.

Dinas Sosial telah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan sebanyak 603 layanan data dan pemberian izin pengumpulan uang dan barang sebanyak 34 izin.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan indikator kinerja Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 100%. Perhitungan ini diukur dengan formulasi jumlah orang terlantar yang dilayani dibagi dengan jumlah orang terlantar yang terjangkau dikali 100%. Selama tahun 2025, Dinas Sosial telah melakukan pelayanan Pemulasaran orang terlantar sebanyak 14 orang, dan pelayanan bagi orang terlantar baik dalam maupun luar Provinsi Jambi sebanyak 211 orang. Dalam kegiatan ini setiap orang terlantar yang dijangkau telah ditangani dan dilakukan pelayanan, baik yang berada di rumah singgah maupun fasilitasi pemulangan ke keluarga dalam Kota Jambi maupun ke daerah asal.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase layanan rehabilitasi sosial dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 105,52%. Perhitungan ini diukur dengan formulasi Jumlah PPKS yang dilayani dibagi dengan Jumlah PPKS seluruhnya dikali 100%. Selama tahun 2025, Dinas Sosial telah melakukan pelayanan kepada PPKS yang dijangkau baik Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial maupun PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial dengan rincian sebagai berikut:

No.	PPKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	4
2	Anak Terlantar	68
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	4
4	Anak Jalanan (ANJAL)	10
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	19
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	32
8	Lanjut Usia Terlantar	244
9	Penyandang Disabilitas	314
10	Tuna Susila	19
11	Gelandangan dan Pengemis	203
12	Pemulung	9
13	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	8
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7
15	Korban Trafficking (Korban Perdagangan Orang)	225
16	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	4
17	Orang dengan Gangguan Jiwa	148
J u m l a h		1,319

Dalam kegiatan ini setiap PPKS di luar panti sosial yang dijangkau telah ditangani dan dilakukan pelayanan kebutuhan dasarnya seperti permakanan, sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, reunifikasi dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kota Jambi telah memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia kepada 76 orang yang berasal dari dana APBD dan 58 orang penerima bantuan dari dana APBN melalui Sentra Alyatama. Bantuan usaha sebanyak 40 orang penerima bantuan dari dana APBN melalui Sentra Alyatama.

Dinas Sosial Kota Jambi telah melaksanakan program Sekolah Rakyat dengan 100 siswa SMA yang berasal dari Keluarga Miskin dan Tidak Mampu.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial dengan indikator Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 105.16%. Perhitungan ini diukur dengan formulasi Jumlah Masyarakat yang terlayani dibagi jumlah masyarakat yang memerlukan layanan dikali 100%.

Selama tahun 2025, Dinas Sosial telah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan sebanyak 9.019 layanan data dan verifikasi Jambi Bugar sebanyak 6.254 jiwa.

Pemberian bantuan sosial bagi warga miskin dan miskin ekstrem berupa sembako sebanyak 4.239 keluarga, bantuan sosial bagi keluarga miskin ekstrem berupa uang sebanyak 66 keluarga. Pemberian bantuan sosial berupa sembako yang bersumber dari Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi sebanyak 4.015 paket.

Pemberian bantuan sosial berupa barang usaha ekonomi produktif kepada keluarga graduasi PKH, PPKS hasil penjangkauan, serta korban bencana sebanyak 56 paket.

Selama tahun 2025, Dinas Sosial telah memfasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 22.462 KPM, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kepada 26.827 KPM. Selain itu Dinas Sosial juga memfasilitasi data keluarga tidak mampu sebagai penerima bantuan CSR Pertamina sebanyak 176 keluarga, bantuan sembako BAZNAS sebanyak 10 keluarga dan bantuan sembako Kemenag sebanyak 10 keluarga.

Selain itu, Dinas Sosial telah melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin sebanyak 57.656 keluarga menggunakan aplikasi Atensi dan Tata Sosial (Atasee) dengan melibatkan sumber daya aparatur Dinas Sosial, Fasilitator Kelurahan, serta Ketua RT di Kota Jambi.

- 5. Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial dengan target 100% memperoleh realisasi sebesar 172,46%. Perhitungan ini diukur dengan formulasi Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani dibagi korban bencana alam dan sosial dikali 100%. Selama tahun 2025, Dinas Sosial telah melakukan pelayanan terhadap 2.242 KK korban bencana alam dengan 4.973 jiwa. Dengan rincian korban bencana banjir curah hujan sebanyak 2.179 KK, korban bencana kebakaran sebanyak 54

KK dan korban bencana putting beliung sebanyak 9 KK. Semua korban bencana telah mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, dukungan psikososial dan lain sebagainya.

3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan Anggaran Belanja pada tahun 2025 sebesar 87,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Jambi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,660,689,051	6,501,490,843	84.87%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,554,800	15,151,100	86.31%
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,504,800	13,126,460	90.50%
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,050,000	2,024,640	66.38%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,943,045,317	4,998,074,892	84.10%
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,721,095,317	4,776,748,242	83.49%
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221,950,000	221,326,650	99.72%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,550,000	23,976,650	78.48%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,550,000	23,976,650	78.48%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121,220,000	85,312,646	70.38%
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54,200,000	54,199,946	100.00%
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67,020,000	31,112,700	46.42%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471,596,534	427,757,422	90.70%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,776,580	16,334,760	97.37%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,258,604	48,465,093	96.43%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,201,350	19,423,637	87.49%
d	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	217,360,000	190,020,932	87.42%
e	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	165,000,000	153,513,000	93.04%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470,282,400	402,342,283	85.55%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,050,000	6,450,000	91.49%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248,200,000	209,485,229	84.40%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215,032,400	186,407,054	86.69%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606,440,000	548,875,850	90.51%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	483,030,000	427,742,770	88.55%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000	68,044,910	97.21%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53,410,000	53,088,170	99.40%
II	Program Pemberdayaan Sosial	1,516,661,850	1,303,284,070	85.93%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,516,661,850	1,303,284,070	85.93%
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	430,479,600	412,830,020	95.90%
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	140,800,000	110,800,000	78.69%
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	677,730,500	533,140,200	78.67%
d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	259,071,750	246,513,850	95.15%
e	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8,580,000	-	0.00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	39,750,000	29,270,211	73.64%
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	39,750,000	29,270,211	73.64%
a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	39,750,000	29,270,211	73.64%
IV	Program Rehabilitasi Sosial	1,156,249,151	1,042,733,679	90.18%
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	686,749,951	631,787,044	92.00%
1	Penyediaan Permakanan	214,700,000	209,789,815	97.71%
2	Penyediaan Sandang	68,665,000	62,038,455	90.35%
3	Penyediaan Alat Bantu	150,000,000	146,369,370	97.58%
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	231,343,746	192,545,340	83.23%
5	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	22,041,205	21,044,064	95.48%
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	469,499,200	410,946,635	87.53%
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	469,499,200	410,946,635	87.53%
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,933,994,235	2,781,117,898	94.79%
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,933,994,235	2,781,117,898	94.79%
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	825,855,235	690,471,958	83.61%
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,902,875,000	1,895,675,000	99.62%
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	205,264,000	194,970,940	94.99%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
VI	Program Penanganan Bencana	491,616,213	462,504,360	94.08%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	245,874,400	218,781,860	88.98%
a	Penyediaan Makanan	86,750,000	73,520,770	84.75%
b	Penyediaan Sandang	101,624,400	95,306,090	93.78%
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50,000,000	49,955,000	99.91%
d	Pelayanan Dukungan Psikososial	7,500,000	-	0.00%
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi	245,741,813	243,722,500	99.18%
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	245,741,813	243,722,500	99.18%
JUMLAH		13,798,960,500	12,120,401,061	87.84%

Pencapaian Kinerja sasaran **Sangat Baik**, diikuti dengan penyerapan anggaran sebesar 87,84% dengan realisasi fisik 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 terealisasi secara efektif dan efisien. Penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan urusan sosialTahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%	172.46%	172.46%	491,616,213	462,504,360	94.08%
2	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	100%	105.16%	105.16%	4,450,656,085	4,084,401,968	91.77%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar Di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	100%	105.52%	105.52%	1,195,999,151	1,072,003,890	89.63%

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

1. Pada umumnya semua Program Kegiatan telah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Persentase Realisasi Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan sosial yang tertangani sebesar 172,46%;
3. Persentase Realisasi Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan sebesar 105,16%;
4. Persentase Realisasi PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani sebesar 105,52%;

1.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Jambi:

1. Menyusun kebijakan terkait Penyelenggaraan PAS;
2. Penerapan aplikasi Atasee dalam memverifikasi dan memvalidasi data PAS agar diperoleh data yang akurat;
3. Mengoptimalisasi kemampuan dan kontribusi PSKS dalam hal penanganan PAS;
4. Mengoptimalisasi sarana prasarana pendukung dalam pelayanan PAS;
5. Mengupayakan peningkatan kemandirian bagi PAS.

Jambi, 14 Januari 2026


KEPALA DINAS SOSIAL,

YUNITA INDRAWATI, AP, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	Persen	100
Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	Persen	100
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	Persen	100

Tabel 4.2
Daftar Inovasi Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	INOVASI	TAHUN	NAMA OPD	KATEGORI INOVASI	RINGKASAN INOVASI
1.	ATASEE (Atensi dan Tata Sosial)	2025	Dinas Sosial	Pelayanan Publik	Atensi dan Tata Sosial (ATASEE) merupakan inovasi berupa aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mempercepat penginputan data bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam SIKS-NG. Penggunaan aplikasi juga mempermudah proses verifikasi dan validasi data dikarenakan dokumen yang diunggah langsung dalam aplikasi. Melalui laman https://dinsos.wdsconsultans.com/login , masyarakat dapat mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial.

Tabel 4.3

Daftar Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Prestasi dan Penghargaan
1	ATASEE	2025	Dinas Sosial	Peringkat Sembilan Kategori Tata Kelola Pemerintah Terbaik
2	Pelayanan Publik	2025	Dinas Sosial	Kategori Sangat Baik pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPAN-RB RI Tahun 2024 dengan Indeks Nilai 4,33
3	Pelayanan Publik	2025	Dinas Sosial	Kualitas Pelayanan Baik pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Ombudsman RI dengan Nilai 85,62.
4	Pencegahan Terorisme	2025	Dinas Sosial	Penghargaan dari Kepolisian RI Detasemen Khusus 88 Anti Teror atas Peran dan Dukungan dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Program Deradikalisasi terhadap Eks Napiter beserta Keluarga di Provinsi Jambi
5	Bahasa Negara	2025	Dinas Sosial	Predikat Terbaik Kategori Lembaga Pemerintah pada Kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2025 oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi